

Pimpinan Komisi VIII Soroti Alokasi untuk VPN di Anggaran Kemenag 2021

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews

Jumat, 26 Jun 2020 23:04 WIB

16 komentar

SHARE [f](#) [t](#) [g](#)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus (Foto: Tangkapan layar YouTube DPR RI)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mempertanyakan rencana alokasi anggaran Kementerian Agama ([Kemenag](#)). Salah satunya, Ihsan mempertanyakan ada alokasi anggaran untuk pembayaran *virtual private network* (VPN).

Hal itu disampaikan Ihsan dalam rapat lanjutan pembahasan rencana anggaran tahun 2021 Kemenag, Jumat (26/6/2020). Komisi VIII diketahui belum menyetujui usulan anggaran Kemenag dalam rapat yang berlangsung sebelumnya.

"Kemudian ada di Sekretariat Jenderal, pemenuhan pembayaran *bandwidth* VPN. Ini pertanyaan besar buat saya nih, Pak, ini apa maksudnya VPN ini?" tanya Ihsan.

Baca juga:

[Komisi VIII Belum Setujui Usulan Anggaran Kemenag, Minta Revisi Alokasi](#)

Ihsan mempertanyakan alokasi pembayaran VPN tersebut karena, menurutnya, VPN biasa digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, menurut Ihsan, VPN juga bisa digunakan mengakses situs-situs porno.

"Pak, setahu saya, yang namanya VPN, itu untuk meretas situs-situs yang dilanggar atau tidak diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia, VPN. Jadi ini bisa digunakan untuk yang baik atau yang tidak? Setahu saya, ini baru bisik-bisik yang di belakang, kalau anak-anak milenial tahu, Pak. Mau

Berita Terpopuler

- #1 Djoko Tjandra yang Bikin Geger Itu Punya Julukan 'Joker'
- #2 OTT Bupati Kutai Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang-Buku Rekening Bank
- #3 Viral Video Seks di Israel, Dua Staf PBB Diskors Tanpa Gaji
- #4 Pernah 'Lawan' Ahok, Gerindra Ngaku Tak Bisa Campuri Urusan Menteri
- #5 Isu Liar Ahok Bakal Jadi Menteri, Golkar Ragu BUMN Jadi Semakin Bagus

[Lihat Selengkapnya →](#)

Foto

9 Foto

4 Foto

Foto News

Jenazah Pelda Anumerta Rama Wahyudi Diterbangkan ke Pekanbaru

Snapshots

Wow! Ada Layang-layang Raksasa Sepanjang 50 Meter di Magelang

5 Foto

4 Foto

Foto News

Trauma Healing untuk Anak-anak Imigran Rohingya di Aceh

Snapshots

Patung Kristus di Rio Refleksikan Penghormatan untuk Korban Corona

**Baca juga:****Rapat di Komisi VIII, Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran 2021 Rp 3,8 T**

Menurut Ihsan, rencana anggaran untuk VPN ini bisa berbahaya. Politikus PDIP itu pun meminta Menag Fachrul Razi memperhatikan kembali rencana untuk alokasi anggaran tahun 2021 ini.

"Kalau ini masuk ke Kesetjengan, ini pisau bermata dua ini, Pak. Bisa dipakai... wah bahaya, Pak. Kalau dipakai untuk *nonton* itu... saya nggak tahu deh kalau Kementerian Agama, tapi kalau di DPR, Pak, sempat ada yang *nonton* film porno itu bisa dipecah, Pak," ujar Ihsan.

"Jadi mungkin untuk VPN ini saya perlu pertanyaan maksudnya apa, apa perlu untuk Saudi Arabia atau apa ini maksudnya? Saya nggak *ngerti* maksudnya apa ini VPN," ucap Ihsan.

Selain itu, Ihsan mempertanyakan rencana alokasi anggaran di Inspektorat Jenderal Kemenag. Ihsan meminta Fachrul memperhatikan peruntukan anggaran tersebut.

"Ada lagi pembiayaan untuk penggantian anggaran dinas pimpinan. Ini berat, Pak, kalau mau disetujui. Pak. Pertama, pimpinannya kalau masih senang berkendara, kena COVID nanti, Pak, di Inspektorat Jenderal. Jadi ini tolong diperhatikan betul, Pak," tuturnya.

Dalam rapat itu, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran Kemenag sebesar Rp 66,6 triliun yang diajukan dalam rapat sebelumnya. Komisi VIII juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 3,8 triliun dengan sejumlah catatan.

Baca juga:**Komisi VIII DPR Minta Kemenag Tak Batasi WNI di Saudi yang Ingin Berhaji**

"Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 66.673.486.995.000 dan usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.836.824.257.000," demikian kesimpulan rapat Komisi VIII dengan Kemenag.

"Dengan catatan, Komisi VIII belum menyetujui Kegiatan Prioritas RKP Kementerian Agama RI tahun 2021 dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran Kegiatan Prioritas RKP dalam waktu yang ditentukan kemudian," imbuhnya.

(azr/zap)

kemenag menag fachrul razi anggaran vpn komisi viii dpr

16 komentar

SHARE

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?Senang
25%Terhibur
75%Terinspirasi
0%Bangga
0%Terkejut
0%Sedih
0%Takut
0%Marah
0%**Komentar Terbanyak**

645 Komentar
Jokowi di Depan Menteri: Untuk Rakyat, Saya Bisa Bubarkan Lembaga-Reshuffle!

487 Komentar
Sujud ke IDI, Risma: Saya Memang Goblok!

437 Komentar
Disodorkan PAN Jadi Menteri Jokowi, Mumtaz Anak Amien Rais: Saya Siap

Video

02:04

01:27

detikFlash

Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Pekerja Seks di Bolivia Minta Pembatasan Dicabut

detikFlash

Mural Raksasa Black Lives Matter di Dekat Kantor Trump

01:47

00:49

detikFlash

Apotek di Makassar Terbakar, Gudang Penyimpanan Obat Ludes

detikFlash

Korban Tewas Akibat Longsor di Tambang Batu Myanmar Jadi 160 Orang

[Lihat Selengkapnya →](#)**Berita Terkait**